



EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN APBDES DESA PONTOLO ATAS DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT PERFORMANCE IN THE MANAGEMENT OF THE PONTOLO ATAS VILLAGE APBDES IN THE DISTRICT NORTH GORONTALO

Sindri Karim Doe^{1*}, Yanti Aneta², Yacob Noho Nani³

^{1*}Universitas Negeri Gorontalo, Email: sindikarimdoe03@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Email: yantianeta@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Email: dwiiindah@ung.ac.id

*email koresponden: sindikarimdoe03@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2711>

Abstrack

This study aims to analyze the effectiveness of government performance in managing the Village Budget (APBDes) in Pontolo Atas Village, North Gorontalo Regency, using Ravich and Riggan's (2017) theory of government performance effectiveness, which includes government performance effectiveness, evaluation, motivation, coaching, and supervision in APBDes management. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the village head, village officials, and the Pontolo Atas Village community. The results of the study indicate that: 1) the effectiveness of government performance in managing the Village Budget (APBDes) in Pontolo Atas Village has been running quite well, but not yet optimal. 2) evaluation, the village government has conducted an evaluation of the Village Budget (APBDes) programs and activities, but its implementation has not been optimal because it is still limited to general discussions and has not touched on all technical aspects of village financial management. 3) this motivation indicates that there is no system provided and sanctions that are running effectively so that the work enthusiasm of village officials in managing the Village Budget (APBDes) is not optimal. 4) this training indicates that the village government has conducted training for village officials, but is still hampered by limited human resources and a lack of technical understanding regarding Village Budget (APBDes) management. 5) this supervision indicates that supervision of the implementation of the Village Budget (APBDes) has been carried out, but has not been carried out intensively and comprehensively so that there are still delays and less than optimal implementation of several village development programs.

Keywords: Performance Effectiveness, Village Government, Village Budget Management, Evaluation, Supervision.



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan teori efektivitas kinerja pemerintah Ravich dan Riggan (2017) yang meliputi efektivitas kinerja pemerintah, evaluasi, motivasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat Desa Pontolo Atas. Hasil penelitian bahwa: 1) efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal. 2) evaluasi, pemerintah desa telah melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan APBDes, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena masih terbatas pada pembahasan umum dan belum menyentuh seluruh aspek teknis pengelolaan keuangan desa. 3) motivasi ini menunjukkan bahwa belum terdapat sistem penghargaan dan sanksi yang berjalan efektif sehingga semangat kerja aparatur desa dalam pengelolaan APBDes belum optimal. 4) pembinaan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa, namun masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis mengenai pengelolaan APBDes. 5) pengawasan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara intensif dan menyeluruh sehingga masih ditemukan keterlambatan dan kurang optimalnya pelaksanaan beberapa program pembangunan desa.

Kata Kunci: Efektivitas Kinerja, Pemerintah Desa, Pengelolaan APBDes, Evaluasi, Pengawasan.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan keuangan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pembangunan desa.

Pengelolaan APBDes dituntut untuk dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Efektivitas kinerja pemerintah desa menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan desa. Kinerja yang efektif tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program yang dijalankan.

Namun demikian, pengelolaan APBDes di berbagai desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi keuangan desa, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program, keterlambatan kegiatan, dan kurang maksimalnya pencapaian tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Permasalahan serupa juga ditemukan di Desa Pontolo Atas, Kabupaten Gorontalo Utara. Meskipun APBDes telah disusun dan dilaksanakan setiap tahun, masih terdapat sejumlah kendala dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Data APBDes tahun 2023 menunjukkan adanya selisih antara target dan realisasi pada beberapa komponen pendapatan maupun belanja desa, serta munculnya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja pemerintah desa melalui dimensi evaluasi, motivasi, pembinaan, dan pengawasan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pengelolaan APBDes. Hasil



penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan metode deskriptif** untuk menganalisis efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas, Kabupaten Gorontalo Utara. Data penelitian diperoleh melalui **observasi, wawancara, dan dokumentasi**, dengan informan yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat yang dianggap mengetahui serta terlibat dalam pengelolaan APBDes. Analisis data dilakukan melalui tahapan **pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas kinerja pemerintah desa yang ditinjau dari aspek evaluasi, motivasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes Desa Pontolo Atas Kabupaten Gorontalo Utara secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum mencapai kondisi yang optimal. Pemerintah desa telah melaksanakan berbagai tahapan pengelolaan APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari sebagian besar program dan kegiatan desa yang dapat direalisasikan serta tercapainya sebagian besar target pendapatan dan belanja desa. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti belum optimalnya realisasi belanja modal, adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA), serta belum maksimalnya dampak program pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kinerja pemerintah desa masih memerlukan perbaikan terutama dalam aspek pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, dan pencapaian target pembangunan desa.

Pada dimensi Evaluasi, penelitian menemukan bahwa pemerintah Desa Pontolo Atas telah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBDes. Evaluasi dilakukan melalui rapat dan pembahasan terkait pelaksanaan kegiatan desa, namun pelaksanaannya masih bersifat umum dan belum menyentuh seluruh aspek teknis pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program belum dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara menyeluruh. Pada dimensi Motivasi, penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat sistem penghargaan (*reward*) maupun sanksi (*punishment*) yang diterapkan secara efektif kepada aparatur desa. Kondisi ini menyebabkan motivasi kerja aparatur dalam mengelola APBDes belum optimal sehingga berpengaruh terhadap kualitas kinerja dan ketepatan pelaksanaan program. Selain itu, pada dimensi pembinaan, pemerintah desa telah memberikan pembinaan dan bimbingan kepada aparatur desa melalui berbagai kegiatan, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan keuangan desa, serta masih rendahnya pemahaman teknis aparatur mengenai pengelolaan APBDes.

Selanjutnya, pada dimensi Pengawasan, penelitian menemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes telah dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun pihak terkait, namun belum berlangsung secara intensif dan menyeluruh. Pengawasan yang dilakukan masih lebih banyak berfokus pada tahap pelaksanaan program, sementara pengawasan pada tahap perencanaan dan penyusunan APBDes belum berjalan maksimal. Akibatnya, masih ditemukan keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan serta kurang optimalnya pencapaian target pembangunan desa. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas berada pada kategori cukup efektif, tetapi masih memerlukan peningkatan melalui penguatan sistem evaluasi, pemberian motivasi yang lebih jelas,



peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan berkelanjutan, serta optimalisasi pengawasan agar pengelolaan APBDes dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pembahasan

Efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih belum optimal dalam mencapai seluruh tujuan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan teori efektivitas kinerja yang dikemukakan oleh Ravich dan Riggan, efektivitas dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam penelitian ini, pemerintah desa telah mampu melaksanakan sebagian besar program yang direncanakan dalam APBDes, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari adanya selisih antara anggaran dan realisasi pada beberapa pos belanja serta munculnya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA), yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih memerlukan peningkatan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

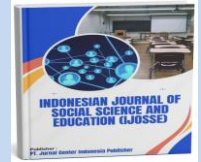
Pada aspek evaluasi, pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan APBDes sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja. Namun, evaluasi yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum menyentuh secara mendalam aspek teknis maupun substansi program yang dilaksanakan. Akibatnya, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya teridentifikasi dan ditindaklanjuti secara komprehensif. Padahal, evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sangat penting untuk mengukur keberhasilan program, mengidentifikasi kelemahan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa pada periode berikutnya.

Dari aspek motivasi, penelitian menunjukkan bahwa belum adanya sistem penghargaan dan sanksi yang diterapkan secara konsisten menyebabkan semangat kerja aparatur desa belum berkembang secara optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam pengelolaan APBDes. Menurut teori motivasi, pemberian penghargaan terhadap kinerja yang baik serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan disiplin dan produktivitas aparatur. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu membangun sistem motivasi yang lebih terstruktur guna mendorong peningkatan tanggung jawab dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, aspek pembinaan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya meningkatkan kapasitas aparatur melalui berbagai kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis. Meskipun demikian, efektivitas pembinaan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis mengenai pengelolaan APBDes. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aparatur masih mengalami kesulitan dalam memahami regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sehingga mereka mampu menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada aspek pengawasan, penelitian menemukan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBDes telah dilakukan oleh pemerintah desa maupun pihak terkait, namun pelaksanaannya belum berlangsung secara intensif dan menyeluruh. Pengawasan lebih banyak dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan, sementara tahap perencanaan dan penyusunan anggaran belum mendapatkan perhatian yang optimal. Akibatnya, masih ditemukan keterlambatan pelaksanaan program serta beberapa kendala dalam pencapaian target pembangunan desa. Pengawasan yang efektif seharusnya dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban agar potensi penyimpangan dapat dicegah dan kualitas pengelolaan APBDes dapat terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas dipengaruhi oleh kualitas evaluasi, motivasi, pembinaan, dan pengawasan yang dijalankan. Keempat aspek tersebut memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu,



peningkatan kapasitas aparaturnya desa, penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan, serta penerapan sistem motivasi yang jelas menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan APBDes dan mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas Kabupaten Gorontalo Utara telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal dalam mencapai seluruh tujuan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa telah melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mampu merealisasikan sebagian besar program pembangunan yang telah direncanakan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pengelolaan APBDes, seperti belum optimalnya realisasi beberapa program pembangunan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta masih adanya sisa anggaran yang menunjukkan belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah desa masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan APBDes dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain itu, efektivitas pengelolaan APBDes sangat dipengaruhi oleh aspek evaluasi, motivasi, pembinaan, dan pengawasan. Evaluasi telah dilakukan tetapi belum menyentuh seluruh aspek teknis pengelolaan keuangan desa, motivasi aparaturnya masih rendah karena belum adanya sistem penghargaan dan sanksi yang jelas, pembinaan aparaturnya belum maksimal akibat keterbatasan kompetensi dan sumber daya manusia, serta pengawasan yang dilakukan belum berlangsung secara intensif dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparaturnya desa melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kualitas evaluasi program, penerapan sistem motivasi yang lebih efektif, serta optimalisasi pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan APBDes. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- (Afriani & Ferina, 2020) *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes DI DESA LUBUK MINDAIBENGKULU UTARA*
- (Ahyaruddin & Amrillah, 2018) Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Factors Determining The Performance Of Local Governments. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(88), 471–486.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*. World Development Journal.
- (Di et al., 2022) Di, D., Wawoone, D., & Wonggeduku, K. (2022). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja*. 4(1), 178–190.
- Dalila, L., Sulila, I., & Isa, R. (2026). *Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango*. 7(1), 115–134.
- Tahun, U. N., Permusyawaratan, B., & Bpd, D. (2014). *Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DIMASA PANDEMI COVID-19 Studi kasus di Desa Tamansri Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pa*. 255–270
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). *Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 02(1), 41–48.



- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mathison, S. (2010). *The Purpose of Educational Evaluation*. 792–797. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01592-X>
- Nurlukman, A. D. (2019). *hanantynosrinugroho*, +PDF+80-98. 1(2).
- Program, M., Administrasi, S., & Area, U. M. (2022). *Efektivitas Kinerja*
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). *Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 02(1), 41–48.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mathison, S. (2010). *The Purpose of Educational Evaluation*. 792–797. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01592-X>
- Nurlukman, A. D. (2019). *hanantynosrinugroho*, +PDF+80-98. 1(2).P
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). *Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 02(1), 41–48.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mathison, S. (2010). *The Purpose of Educational Evaluation*. 792–797. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01592-X>
- Mozin, S. Y., Isa, R., Administrasi, J., Fakultas, P., Sosial, I., & Gorontalo, U. N. (2023). *Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. 1(4), 150–155.
- Nurlukman, A. D. (2019). *hanantynosrinugroho*, +PDF+80-98. 1(2).
- Program, M., Administrasi, S., & Area, U. M. (2022). *Efektivitas Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Lingkungan The Effectiveness of the Performance of the Sub-District Government in the Environmental Hygiene Empowerment Program*. 4(1), 9–19. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1179>
- Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, R. (2011). *DESA DIGITAL : PELUANG UNTUK MENOPTIMALKAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA* □. 2011(Snatek), 75–88.
- rogram, M., Administrasi, S., & Area, U. M. (2022). *Efektivitas Kinerja*
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). *Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 02(1), 41–48.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mathison, S. (2010). *The Purpose of Educational Evaluation*. 792–797. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01592-X>
- Nurlukman, A. D. (2019). *hanantynosrinugroho*, +PDF+80-98. 1(2).
- Program, M., Administrasi, S., & Area, U. M. (2022). *Efektivitas Kinerja*
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). *Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 02(1), 41–48.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mathison, S. (2010). *The Purpose of Educational Evaluation*. 792–797. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01592-X>
- Nurlukman, A. D. (2019). *hanantynosrinugroho*, +PDF+80-98. 1(2).P
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). *Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 02(1), 41–48.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mathison, S. (2010). *The Purpose of Educational Evaluation*. 792–797. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01592-X>
- Nurlukman, A. D. (2019). *hanantynosrinugroho*, +PDF+80-98. 1(2). Program, M., Administrasi, S., & Area, U. M. (2022). *Efektivitas Kin*